

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Pembangunan Sosial**

###### **2.1.1.1 Konsep Pembangunan Sosial**

Pembangunan merupakan sebuah proses sejarah yang berkelanjutan, terus bergerak dari waktu ke waktu tanpa henti. Proses ini mengandung perubahan yang tak pernah berhenti, dengan tujuan menuju kebaikan yang memerlukan arahan dari semua usaha manusia untuk mewujudkan aspirasi yang diimpikan. Dalam esensinya, pembangunan mencerminkan sebuah proses penalaran yang mendalam dalam upaya mengembangkan budaya dan peradaban manusia (Kustiawan et al., 2023).

Pembangunan merupakan proses dinamis transformasi sosioekonomikultural yang dilakukan secara sengaja dan terencana untuk mengubah status kemajuan suatu entitas sosial. Tujuannya adalah untuk mengangkat masyarakat dari status atau tingkatan yang dianggap tertinggal ke tingkat perkembangan berikutnya yang dianggap lebih mapan dan modern. Proses ini melibatkan berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Harjo Sudarmosudigdo yang dikutip dari Kustiawan (2023) secara etimologis, kata "pembangunan" dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kata "wangun" memiliki arti dasar yang mencerminkan keadaan yang pantas, serasi, dan harmonis, yang berkaitan dengan kepercayaan, teknologi, dan ekonomi.
2. Kata "mbangun" mengacu pada aktivitas membangun usaha atau melakukan pengadaan.

Jadi, secara keseluruhan, "pembangunan" merujuk pada proses atau usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi yang serasi dan harmonis dalam aspek kepercayaan, teknologi, dan ekonomi, serta melibatkan upaya membangun atau mengembangkan berbagai inisiatif atau infrastruktur untuk mencapai tujuan tersebut.

Kustiawan et al (2023) Pembangunan dapat didefinisikan sebagai usaha sadar yang dilakukan oleh suatu bangsa atau negara untuk mengarahkan modernisasi dalam proses pembinaan bangsa atau *nation building*. Ini merupakan upaya terencana untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pembaruan di semua aspek kehidupan dengan mengimplementasikan teknologi dan pendekatan yang terpilih. Menurut Rogers (1985), pembangunan adalah transformasi yang bertujuan memperbaiki sistem sosial dan ekonomi sesuai dengan keinginan masyarakat yang bersangkutan (Kustiawan et al., 2023).

Kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti dari pengertian Pembangunan sosial merupakan upaya untuk memperluas pilihan yang tersedia bagi masyarakat, dengan masyarakat menjadi fokus utamanya (Qasim, 2013). Pendekatan ini melibatkan pemahaman terhadap berbagai isu yang ada dalam masyarakat, termasuk pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik, serta nilai-nilai kultural dengan mempertimbangkan perspektif manusia dan gender. Pembangunan manusia, seperti yang ditekankan oleh BPS (2001), memperhatikan aspek-aspek komprehensif dari seluruh sektor dalam upaya mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Konsep-konsep dalam pembangunan sosial mencakup berbagai dimensi seperti ukuran pembangunan sosial, integrasi global, partisipasi masyarakat, keamanan sosial yang baru, peran gender dalam pertumbuhan ekonomi, dan upaya pengentasan kemiskinan, yang semuanya berperan penting dalam mengarahkan perubahan positif dalam masyarakat.

#### **2.1.1.2 Gerakan dalam Pembangunan Sosial**

Menurut Firdausy (1998), ada empat komponen utama dalam paradigma gerakan pembangunan sosial, yaitu: pemerataan dan kesetaraan, berkelanjutan, produktivitas, dan pemberdayaan.

##### **A. Pemerataan dan Kesetaraan**

Pemerataan dan kesetaraan masyarakat mengacu pada upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan kondisi di mana setiap individu memiliki akses yang adil dan setara terhadap sumber

daya, peluang, hak, dan manfaat yang ada dalam masyarakat. Dengan cara ini, upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dan merata dalam proses pembangunan dan kemajuan sosial ekonomi, tanpa adanya diskriminasi atau ketidakadilan (Deswin Miechaels Siringo-Ringo et al., 2021).

1. Pemerataan (*Redistribution*):

Pemerataan berfokus pada redistribusi sumber daya ekonomi, seperti pendapatan dan kekayaan, untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok-kelompok ekonomi. Program pemerataan dapat melibatkan pajak yang progresif (tarif pajak yang meningkat seiring dengan pendapatan), program bantuan sosial, dan kebijakan lainnya untuk memastikan distribusi yang lebih merata.

2. Kesetaraan (*Equality*):

Kesetaraan berkaitan dengan memberikan hak, peluang, dan perlakuan yang sama kepada semua individu, tanpa memandang perbedaan seperti jenis kelamin, ras, agama, atau kelas sosial. Kesetaraan juga melibatkan akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan, dan partisipasi dalam proses politik.

Upaya pemerataan dan kesetaraan masyarakat dapat diimplementasikan melalui kebijakan pemerintah, perubahan dalam sistem ekonomi, pendidikan yang inklusif, serta kampanye kesadaran masyarakat untuk mengatasi prasangka dan diskriminasi. Penting untuk diingat bahwa pemerataan dan kesetaraan bukan hanya masalah keadilan sosial, tetapi juga dapat memiliki dampak positif terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan politik suatu masyarakat. Implementasi kebijakan yang mendukung pemerataan dan kesetaraan diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, dinamis, dan berkelanjutan (Sugianto et al., 2017).

B. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan mengacu pada pendekatan pembangunan yang memperhatikan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Konsep

ini melibatkan tiga dimensi utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan yang berkelanjutan antara pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, keadilan sosial yang meningkat, dan perlindungan lingkungan yang optimal. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini secara holistik, pembangunan berkelanjutan berupaya untuk memastikan bahwa kebutuhan saat ini terpenuhi tanpa merusak kemampuan alam dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka di masa depan (Antasari, 2020).

Semua negara anggota PBB telah sepakat untuk berkontribusi dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Ini dilakukan sejalan dengan agenda Tujuan Pembangunan Milenium. Pembangunan berkelanjutan bukanlah sesuatu yang dapat dicapai sepenuhnya dalam waktu 15 tahun, sehingga pada Januari 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ditetapkan dengan target penyelesaian pada tahun 2030. Agenda ini menetapkan kerangka kerja global untuk menangani tantangan-tantangan utama seperti kemiskinan ekstrem, ketidaksetaraan, perubahan iklim, dan perlindungan lingkungan, dengan harapan untuk mencapai kemajuan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia dan kelestarian bumi (Rachman et al., 2022). Tujuan keberlanjutan adalah:

1. Pemberantasan kemiskinan,
2. Kelaparan dan kekurangan gizi akan dihentikan,
3. Memastikan Pelayanan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
4. Memberikan kualitas Pendidikan untuk semua dan promosi kesempatan belajar seumur hidup untuk semua,
5. Mempromosikan kesetaraan gender dan bekerja untuk memberdayakan perempuan,
6. Menjamin air minum bersih dan sanitasi,
7. Memastikan handal, listrik modern yang terjangkau untuk semua,
8. Pertumbuhan ekonomi yang aman Menciptakan lapangan kerja bagi

para pengangguran,

9. Promosi industri, inovasi dan infrastruktur,
10. Menciptakan kota dan masyarakat yang aman, berkelanjutan dan tangguh,
11. Memastikan konsumsi dan produksi barang yang berkelanjutan,
12. Memastikan ketahanan lingkungan
13. Melindungi kehidupan di bawah air,
14. Perlindungan hidup di bumi,
15. Mempromosikan perdamaian, keadilan dan institusi yang kuat,
16. Membangun kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

### C. Produktivitas Masyarakat

Produktivitas masyarakat merujuk pada kemampuan masyarakat dalam menghasilkan barang dan jasa secara efisien dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Produktivitas ini dapat diukur melalui berbagai indikator, termasuk tingkat produksi per individu atau per pekerja, efisiensi penggunaan sumber daya, dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Tinggi rendahnya produktivitas masyarakat dapat mempengaruhi kesejahteraan dan perkembangan suatu negara atau wilayah (Herawati et al., 2023).

Menurut Triono (2018) Berikut beberapa faktor yang dapat memengaruhi produktivitas masyarakat:

1. Pendidikan: Tingkat pendidikan masyarakat secara langsung berkaitan dengan produktivitas. Masyarakat yang memiliki akses dan partisipasi tinggi dalam pendidikan cenderung memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik, yang dapat meningkatkan produktivitas secara keseluruhan.
2. Teknologi: Penggunaan teknologi yang canggih dan inovatif dapat meningkatkan efisiensi produksi dan produktivitas. Perkembangan teknologi informasi, otomatisasi, dan digitalisasi dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan daya saing dan kualitas produk atau layanan.

3. **Infrastruktur:** Ketersediaan infrastruktur yang baik, seperti transportasi yang efisien, listrik, air bersih, dan telekomunikasi, dapat mendukung produktivitas dengan memfasilitasi distribusi barang dan jasa, serta mengurangi biaya produksi.
4. **Kesehatan Masyarakat:** Masyarakat yang sehat cenderung lebih produktif. Akses terhadap layanan kesehatan yang baik, nutrisi yang memadai, dan sanitasi yang layak dapat meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan, yang pada gilirannya dapat berdampak positif pada produktivitas.
5. **Kebijakan Ekonomi:** Kebijakan ekonomi yang mendukung investasi, pelatihan tenaga kerja, dan pertumbuhan sektor-sektor produktif dapat meningkatkan produktivitas masyarakat.
6. **Kelembagaan:** Sistem kelembagaan yang baik, seperti peraturan yang jelas, perlindungan hukum, dan tata kelola yang baik, dapat menciptakan lingkungan yang mendukung produktivitas ekonomi.

Peningkatan produktivitas masyarakat merupakan tujuan penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan faktor-faktor di atas dapat membantu masyarakat mencapai tingkat produktivitas yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan (Triono, 2018).

#### D. Pemberdayaan

Sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya. Hal ini dilakukan melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Dengan pendekatan ini, pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk memperkuat kapasitas individu dan komunitas dalam mengatasi tantangan sosial ekonomi serta meningkatkan

partisipasi mereka dalam proses pembangunan secara berkelanjutan. Indikator keberhasilan masyarakat menurut Sofiyanto, Mardani, & Salim (2017) untuk mengukur pelaksanaan program pemberdayaan yaitu :

1. Jumlah warga yang secara nyata tertarik untuk hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan menunjukkan tingkat partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat dalam program tersebut.
2. Frekuensi kehadiran masing-masing warga dalam setiap jenis kegiatan yang dilaksanakan.
3. Tingkat keterbukaan dan kelancaran proses penyelenggaraan program dalam mendapatkan pertimbangan atau persetujuan dari warga terhadap ide-ide baru yang diajukan.
4. Jumlah dan ragam ide yang diajukan oleh masyarakat yang dilibatkan dalam proses perencanaan pelaksanaan program kegiatan.
5. Jumlah sumber dana yang dapat dikumpulkan dari masyarakat untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan.
6. Intensitas aktivitas petugas dan penanganan masalah.
7. Peningkatan dalam skala partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan.
8. Berkurangnya masyarakat yang menderita sakit.
9. Meningkatnya kesadaran dan respons terhadap pentingnya meningkatkan kesehatan.
10. Meningkatkan kemandirian kesehatan masyarakat.

### **2.1.1.3 Peran Masyarakat dalam Pembangunan Sosial**

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mencakup lebih dari sekadar mengikuti perencanaan atau mengambil bagian dalam pengambilan keputusan. Menurut Lumintang Juliana (2015), ini juga melibatkan proses memantau dan mengevaluasi hasil-hasil pembangunan serta menjaga keberlanjutannya. Aspirasi dan inspirasi masyarakat disalurkan melalui pertemuan atau rapat, di mana ide-ide ini kemudian dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan yang membentuk program-program pembangunan. Tingkat partisipasi yang tinggi dalam

implementasi program-program ini menjadi kunci untuk mencapai hasil yang berkelanjutan dan relevan bagi masyarakat yang dilayani.

Partisipasi masyarakat memiliki hubungan erat dengan kemampuan mereka untuk berkembang secara mandiri. Kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan indikasi awal kemampuan mereka untuk mandiri. Rasa memiliki tujuan mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan kolektif, sehingga partisipasi horizontal menjadi salah satu indikator kualitas partisipasi masyarakat. Partisipasi horizontal mengacu pada kemampuan sadar dan sukarela untuk memilih dan menyetujui suatu hal, menyerap nilai, atau menerima tugas tertentu. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk belajar dari pengalaman-pengalaman kecil yang kemudian dapat diterapkan pada tantangan yang lebih besar. Keyakinan akan kemampuan masyarakat sendiri adalah bagian dari sikap inovatif dalam pengembangan masyarakat yang mandiri (Ndraka, 1987:64).

## **2.1.2 Partisipasi Masyarakat**

### **2.1.2.1 Konsep Partisipasi Masyarakat**

Terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, dijelaskan bahwa wadah partisipasi masyarakat tersebut merupakan mitra bagi pemerintah desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Selain itu, mereka juga berperan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Hal ini menunjukkan pentingnya peran aktif masyarakat desa dalam menentukan arah pembangunan lokal serta memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat dipertimbangkan dalam setiap langkah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Partisipasi masyarakat adalah elemen kunci dari konsep pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merujuk pada suatu proses di mana individu atau kelompok masyarakat diberi kemampuan, pengetahuan, dan sumber daya untuk meningkatkan kontrol atas hidup mereka, membuat keputusan yang lebih baik, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Pemberdayaan masyarakat melibatkan penguatan individu atau kelompok dalam

hal pengetahuan, keterampilan, dan akses terhadap sumber daya, sehingga masyarakat dapat mengatasi tantangan, meningkatkan keberdayaan, dan berkontribusi pada pembangunan komunitas (Maryani, Dedeh and Nainggolan, 2019; Mina, 2016; Purwadi et al., 2021).

Partisipasi, berasal dari kata bahasa Inggris "*Participation*", merujuk pada pengambilan bagian atau pengikutsertaan seseorang atau kelompok dalam proses tertentu. Menurut John M. Echols & Hasan Shadily (2000: 419), partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif dalam bentuk memberikan masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, atau materi, serta turut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil dari suatu kegiatan pembangunan. Definisi ini menunjukkan bahwa partisipasi melibatkan kontribusi aktif dan keterlibatan dalam berbagai aspek yang berkontribusi pada pembangunan, baik dalam bentuk pernyataan maupun tindakan konkret.

Kesempatan berperan dalam partisipasi dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut (Sumaryadi, 2010: 46):

- a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan.
- b. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat.
- c. Menumbuhkan ketanggapan dan kesegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial.
- d. Memberikan saran dan pendapat.
- e. Menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

Pengertian serupa tentang partisipasi diungkapkan oleh Djalal, Fasli, dan Dedi Supriadi (2001: 201-202), yang menyatakan bahwa partisipasi juga dapat berarti bahwa pembuat keputusan mengajak kelompok atau masyarakat untuk terlibat dengan menyampaikan saran dan pendapat. Ini menunjukkan bahwa partisipasi bukan hanya tentang keterlibatan fisik atau material, tetapi juga melibatkan proses konsultasi dan kontribusi ide, yang memungkinkan masyarakat memiliki suara dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Dengan demikian, partisipasi mendorong inklusivitas dan kolaborasi antara masyarakat dan para pembuat kebijakan.

Partisipasi juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah masyarakat

sendiri, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya. Menurut H.A.R. Tilaar (2009: 287), partisipasi adalah manifestasi dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan perencanaan dari bawah (*bottom-up*) yang mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan komunitas mereka. Ini berarti bahwa masyarakat diberi ruang untuk mengenali kebutuhan mereka, merumuskan solusi, dan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah yang ada, sehingga mereka menjadi bagian integral dari seluruh proses pembangunan.

Menurut Simatupang (dalam Yuwono, 2001:124) memberikan beberapa rincian tentang partisipasi sebagai berikut :

- a) Partisipasi berarti bahwa setiap tindakan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya kolektif yang dilakukan secara gotong royong dengan sesama warga negara untuk membangun masa depan bersama.
- b) Partisipasi juga berarti bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama di antara semua warga negara yang memiliki latar belakang kepercayaan yang beragam dalam negara Pancasila, dengan hak dan kewajiban yang sama untuk berkontribusi dalam membangun masa depan bangsa yang baru.
- c) Partisipasi bukan hanya tentang mengambil bagian dalam pelaksanaan dan perencanaan pembangunan. Partisipasi juga berarti memberikan kontribusi untuk memastikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita keadilan sosial tetap dihargai dalam setiap aspek pembangunan.
- d) Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong terwujudnya pembangunan yang selaras dengan martabat manusia. Ini mencakup keadilan sosial dan keadilan nasional, serta menjaga alam sebagai lingkungan hidup manusia agar tetap lestari bagi generasi mendatang.

Partisipasi masyarakat melibatkan keterlibatan aktif dan kontribusi dari individu, kelompok, atau komunitas dalam berbagai aspek kehidupan dan pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka. Partisipasi ini mencakup berbagai tingkatan, mulai dari tingkat lokal hingga tingkat nasional, dan bisa melibatkan berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan

(Ngongare et al., 2019).

Konsep partisipasi memiliki peran krusial dalam menjunjung nilai-nilai demokrasi. Osborne dan Gaebler menggarisbawahi pentingnya partisipasi masyarakat dengan memperkenalkan prinsip "*community owned government*" dalam konsep *reinventing government*, yang menekankan pemberdayaan masyarakat daripada hanya pelayanan semata. Perspektif baru dari *New Public Service* semakin memperkuat pentingnya partisipasi masyarakat, di mana identitas warga negara tidak hanya terfokus pada kepentingan diri sendiri tetapi juga mencakup nilai-nilai, kepercayaan, dan kepedulian terhadap sesama. Warga negara dipandang sebagai pemilik pemerintahan dan memiliki peran aktif dalam mencapai tujuan bersama untuk kesejahteraan yang lebih baik. Kepentingan publik tidak lagi dilihat sebagai akumulasi dari kepentingan pribadi semata, melainkan sebagai hasil dari dialog dan keterlibatan publik dalam mencari nilai dan kepentingan yang bersama-sama (Muluk, 2007:33).

Partisipasi masyarakat dalam program pemerintahan dapat meningkatkan kemandirian yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan. Masyarakat dapat terlibat dalam semua tahapan dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi program-program pembangunan. Hal ini telah mengubah persepsi masyarakat terhadap partisipasi, di mana sekarang partisipasi tidak hanya dipandang sebagai kesempatan yang diberikan oleh pemerintah secara sukarela, tetapi sebagai sebuah layanan dasar dan bagian yang integral dari tata kelola lokal. (Maryani, Dedeh and Nainggolan, 2019). Maka, partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keterlibatan mereka dalam program-program pembangunan, baik itu dalam perencanaan, implementasi, maupun evaluasi, dengan tujuan untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain guna mencapai kesuksesan dalam pelaksanaan program pembangunan tersebut.

#### **2.1.2.2 Tujuan Partisipasi**

Schiller dan Antlov (2010) mengemukakan bahwa ada 6 tujuan melakukan partisipasi :

- a. Menciptkan visi bersama

Merumuskan tujuan dan wewenang serta nilai-nilai yang menjadi landasan

suatu organisasi, serta visi ke depannya, bertujuan untuk memicu diskusi dan mempengaruhi arah tujuan masa depan secara efektif.

b. Membangun rencana

Setelah visi bersama dirumuskan untuk menetapkan tujuan spesifik yang ingin dicapai, langkah berikutnya adalah menginisiasi proses lanjutan untuk merancang rencana strategis.

c. Mengumpulkan gagasan

Mengumpulkan gagasan dilakukan dengan cara berkomunikasi lisan maupun tertulis, dengan tujuan untuk menghimpun sebanyak mungkin ide dari semua peserta yang terlibat dalam proses partisipasi.

d. Menentukan prioritas/pilihan

Menentukan prioritas bertujuan untuk mengatur berbagai ide yang muncul dalam proses partisipasi agar dapat difokuskan pada hal-hal yang paling penting atau mendesak.

e. Menjaring aspirasi

Menjaring aspirasi bertujuan untuk mengumpulkan informasi, gagasan, dan kepedulian mengenai suatu isu atau rencana antara pemerintah dan masyarakat dalam proses perencanaan. Melalui proses ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan, memberikan alternatif desain, pilihan investasi, serta pengelolaannya.

f. Analisis situasi

Analisis situasi bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan peluang serta untuk mengoptimalkan penanganan kelemahan dan ancaman, sehingga mempermudah dalam merumuskan langkah-langkah untuk menghadapinya.

### **2.1.2.3 Manfaat Partisipasi**

Dalam konteks pemerintahan demokratis, konsep partisipasi masyarakat menjadi esensial karena secara langsung terkait dengan prinsip demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai sumber kedaulatan dan fokus utama pemerintahan. Menurut Thomsen yang disitir oleh Suriana dalam tesisnya tentang "Analisis Keberlanjutan Pengelolaan Sumber Daya Laut Gugus Pulau Kaledupa Berbasis

Partisipasi Masyarakat" (Suriana, 2009: 13), partisipasi masyarakat memberikan beberapa manfaat penting. Pertama, partisipasi memperluas cakupan pengetahuan dan representasi, memungkinkan berbagai perspektif untuk diakomodasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi membantu membangun transparansi komunikasi dan dinamika hubungan kekuasaan di antara para pemangku kepentingan. Ketiga, partisipasi mendorong pendekatan iteratif dan siklikal, memastikan solusi-solusi yang diusulkan didasarkan pada pemahaman dan pengetahuan lokal yang mendalam.

Selanjutnya, partisipasi juga memperkuat kepemilikan lokal, komitmen, dan akuntabilitas. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, proyek-proyek pembangunan lebih mungkin mencapai hasil yang berkelanjutan karena mendapatkan dukungan dan pengawasan dari masyarakat setempat. Hasil-hasil ini cenderung lebih diterima oleh semua pihak yang terlibat. Terakhir, pendekatan partisipatif membangun kapasitas masyarakat dan modal sosial, meningkatkan pengetahuan tentang aktivitas dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan lain, sehingga meningkatkan kolaborasi dan koordinasi antarstakeholder.

#### **2.1.2.4 Bentuk/Tipologi Partisipasi Masyarakat**

Bentuk partisipasi menurut Effendi yang dikutip oleh Astuti D, Siti Irene (2011: 58), terbagi atas:

- a) Partisipasi Pasif adalah ketika masyarakat terlibat dalam proses pembangunan karena kewajiban formal, tanpa memiliki kemampuan untuk mengubah atau mempengaruhi hasilnya.
- b) Partisipasi dalam Pemberian Informasi terjadi ketika masyarakat hanya memberikan informasi yang diminta oleh perencana pembangunan melalui menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.
- c) Partisipasi melalui Konsultasi adalah saat masyarakat terlibat dalam konsultasi, di mana pihak luar bertindak sebagai pendengar yang berusaha mendefinisikan masalah yang dihadapi masyarakat dan merumuskan solusi.
- d) Partisipasi untuk Insentif Materiil terjadi ketika masyarakat

menyumbangkan sumber daya yang mereka miliki, seperti tenaga dan tanah, sebagai imbalan berupa makanan, uang, atau penggantian materi lainnya.

- e) Partisipasi Fungsional terjadi ketika masyarakat membentuk kelompok atau kepanitiaan yang didorong atau diprakarsai oleh pihak luar.
- f) Partisipasi Interaktif melibatkan masyarakat dalam analisis dan perencanaan pembangunan, di mana kelompok dapat bekerja sama dengan lembaga donor untuk mengontrol dan membuat keputusan terkait masalah lokal.
- g) Mobilisasi Mandiri adalah ketika masyarakat secara inisiatif memulai dan menjalankan pembangunan tanpa campur tangan yang signifikan dari pihak luar, meskipun mereka dapat membantu dalam penyusunan kerangka kerja.
- h) Memicu Perubahan adalah partisipasi yang melibatkan pembentukan agen perubahan dalam masyarakat, yang bertugas mengajak atau mempengaruhi masyarakat untuk melakukan perubahan.
- i) Partisipasi Optimal fokus pada konteks dan tujuan pembangunan, yang akan menentukan bentuk partisipasi yang paling sesuai untuk digunakan.

#### **2.1.2.5 Faktor dan hambatan Keberhasilan Partisipasi Masyarakat**

Menurut Selamat seperti yang dikutip oleh Theresia (2014), pertumbuhan dan perkembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat dipengaruhi oleh tiga elemen kunci. Pertama, terdapat peluang yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif. Kedua, adanya keinginan yang kuat dari masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan. Dan ketiga, masyarakat memiliki kemampuan yang memadai untuk memberikan kontribusi dalam berbagai aspek pembangunan.

Sementara itu, Najib dalam Tanuwijaya (2016) menjelaskan bahwa keberhasilan partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh:

- a) Inisiasi Partisipasi: Siapa yang menginisiasi partisipasi, baik pemerintah pusat, daerah, atau LSM, menentukan arah dan kelancaran proses partisipasi.

- b) Tujuan Partisipasi: Partisipasi dilakukan untuk kepentingan pemerintah atau masyarakat, mempengaruhi motivasi dan hasil dari partisipasi tersebut.
- c) Kontrol atas Proses: Siapa yang mengendalikan proses partisipasi, apakah pemerintah pusat, daerah, atau LSM, memengaruhi pemahaman terhadap masalah lokal dan kebutuhan masyarakat serta mempengaruhi keberhasilan partisipasi.
- d) Hubungan Pemerintah-Masyarakat: Hubungan yang kuat dan saling percaya antara pemerintah dan masyarakat mendukung kelancaran partisipasi.
- e) Aspek Kultural: Tradisi partisipasi dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah menjadi norma yang mempengaruhi tingkat keberhasilan partisipasi.
- f) Faktor Politik: Stabilitas pemerintahan dan sistem yang transparan serta demokratis merupakan faktor penting dalam partisipasi yang efektif.
- g) Legalitas: Adanya regulasi yang menjamin partisipasi warga dalam pengelolaan pembangunan, terintegrasi dalam sistem pemerintahan daerah, memperkuat partisipasi.
- h) Aspek Ekonomi: Mekanisme yang memastikan akses bagi warga miskin untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat yang setara mendukung keberhasilan partisipasi.
- i) Kepemimpinan: Kepemimpinan yang berkarakter dan komitmen dalam mendorong serta melaksanakan partisipasi, baik dari pemerintah, LSM, masyarakat, atau tokoh lokal, mendukung partisipasi yang efektif.
- j) Kontinuitas: Penerapan partisipasi yang berkelanjutan dalam jangka waktu yang cukup lama meningkatkan keberhasilan partisipasi.
- k) Jaringan Komunikasi: Adanya jaringan yang efektif menghubungkan warga masyarakat dan pemerintah, seperti forum warga, memfasilitasi komunikasi dan kerja sama yang baik dalam partisipasi pembangunan.

Sedangkan faktor yang dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam suatu pembangunan menurut Soetrisno dalam Theresia (2014)

mengidentifikasi beberapa masalah kaitanya dengan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yakni;

- a. Kurangnya Pemahaman Terhadap Partisipasi Masyarakat: Salah satu masalah utama dalam pengembangan partisipasi masyarakat adalah ketidaktahuan pihak perencana dan pelaksana pembangunan terhadap konsep sebenarnya dari partisipasi. Pada tahap perencanaan, partisipasi sering kali hanya diartikan sebagai dukungan masyarakat terhadap pembangunan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh pemerintah, yang mengakibatkan masyarakat cenderung bersifat pasif dan hanya berperan sebagai pengeksekusi kebijakan pemerintah. Selama pelaksanaan di lapangan, pembangunan yang diinisiasi oleh pemerintah sering dianggap sebagai kebutuhan masyarakat, sementara usulan dari masyarakat yang tidak didesain oleh pemerintah sering kali dianggap sebagai keinginan yang mendapat prioritas rendah.
- b. Ideologi Pembangunan yang Terpusat: Masalah kedua adalah pendekatan pembangunan yang sering kali dianggap sebagai ideologi yang harus dijaga dan diamankan dengan ketat oleh aparat pemerintah, yang cenderung otoriter.
- c. Regulasi yang Menghambat: Masalah ketiga adalah jumlah aturan yang berlebihan yang sering kali menghambat partisipasi aktif masyarakat yang ingin terlibat dalam proses pembangunan.

### **2.1.3 Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pemeliharaan lingkungan hidup merujuk pada tindakan-tindakan untuk melindungi dan mempertahankan keberlangsungan lingkungan hidup dari berbagai bentuk degradasi, pencemaran, atau kerusakan yang dapat mengancam ekosistem dan sumber daya alam yang ada di dalamnya (Daryanto & Suprihatin, 2013)

#### **2.1.3.1 Lingkungan Hidup**

Lingkungan, berasal dari bahasa Perancis "*environner*" yang berarti mengelilingi atau menyelimuti, memiliki dua makna utama. Pertama, lingkungan merujuk pada kondisi fisik yang mengelilingi atau melingkupi suatu organisme atau kelompok organisme. Kedua, lingkungan juga mencakup kondisi sosial dan

budaya yang mempengaruhi individu atau komunitas manusia (Mawardi, 2011: 24). Dalam konteks Kamus Bahasa Indonesia, lingkungan hidup mengacu pada segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup (organisme) dan memiliki pengaruh timbal balik terhadap kehidupan makhluk tersebut.

Menurut Aziz (2013 : 41) lingkungan merujuk pada gabungan kondisi fisik yang meliputi sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang hidup di daratan dan perairan. Selain itu, lingkungan juga mencakup aspek kelembagaan yang melibatkan keputusan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Ini mencakup bagaimana manusia mengelola dan memanfaatkan lingkungan fisik dengan mempertimbangkan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Lingkungan terdiri dari dua komponen yaitu;

a. Komponen Abiotik / Lingkungan Mati

Lingkungan abiotik merujuk pada semua faktor non-hidup yang memengaruhi kehidupan organisme, termasuk tanah, udara, air, iklim, kelembaban, cahaya, topografi, dan bunyi. Secara rinci, komponen abiotik ini mencakup kondisi fisik dan kimia di sekitar organisme, yang berperan sebagai medium dan substrat penting untuk mendukung kelangsungan hidup dan kehidupan organisme tersebut.

b. Komponen Biotik / Lingkungan Hidup

Komponen biotik mencakup semua organisme yang hidup, seperti tumbuhan, hewan, manusia, serta mikro-organisme seperti virus dan bakteri. Lingkungan hidup, atau sering disebut sebagai lingkungan, adalah istilah yang mencakup semua entitas hidup dan non-hidup di alam, baik di Bumi secara keseluruhan maupun dalam bagian-bagian tertentu dari Bumi, yang berfungsi secara alami tanpa campur tangan manusia yang berlebihan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 mendefinisikan lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Ruang lingkup

lingkungan hidup Indonesia mencakup wilayah dan tempat di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan.

Lingkungan hidup meliputi semua unsur fisik, biologis, dan sosial yang ada di suatu tempat di mana manusia atau makhluk hidup lain berada, dan memiliki potensi untuk mempengaruhi kehidupan mereka. Ini mencakup tidak hanya elemen-elemen alam seperti udara, air, tanah, dan flora serta fauna, tetapi juga segala interaksi sosial dan perilaku manusia yang ada di dalamnya. Manusia tidak dapat terlepas dari lingkungannya karena kehidupan mereka sangat tergantung pada kondisi lingkungan tersebut. Misalnya, udara yang mereka hirup harus bersih untuk menjaga kesehatan pernapasan, sumber daya alam seperti air dan makanan diperlukan untuk kelangsungan hidup, dan aspek-aspek sosial seperti interaksi dengan masyarakat juga memengaruhi kualitas hidup mereka.

Kehadiran manusia dalam lingkungan ini tidak hanya sebagai pengamat, tetapi juga sebagai agen yang mempengaruhi lingkungan itu sendiri. Aktivitas manusia, mulai dari penggunaan sumber daya alam hingga pengembangan infrastruktur, dapat memiliki dampak signifikan terhadap ekosistem dan keseimbangan lingkungan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman dan kesadaran akan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup menjadi krusial. Hal ini tidak hanya untuk memastikan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, tetapi juga untuk memastikan bahwa kegiatan manusia tidak merusak atau mengancam keseimbangan alam yang mendukung kehidupan.

Menjaga lingkungan hidup memiliki dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Salah satu manfaat utamanya adalah menciptakan ketertiban dan kebersihan yang membantu menjaga keseimbangan antara lingkungan tempat tinggal manusia dan alam sekitarnya. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, masyarakat dapat mengurangi kemungkinan penyebaran penyakit yang disebabkan oleh kotoran atau limbah yang tidak dikelola dengan baik. Selain itu, melalui program-program seperti penanaman dan pelestarian pohon, masyarakat dapat berperan aktif dalam memelihara keindahan dan kesehatan lingkungan. Ini

tidak hanya membangun kesadaran akan pentingnya kebersihan dan kelestarian lingkungan, tetapi juga membantu dalam memulihkan kondisi alam yang mungkin terganggu akibat aktivitas manusia. Gerakan ini bukan hanya tentang menciptakan keasrian dan kenyamanan visual, tetapi juga tentang menjaga fungsi ekologis lingkungan yang mendukung kehidupan kita. Dengan demikian, memelihara lingkungan hidup bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan investasi dalam kualitas hidup dan kesejahteraan bersama di masa depan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) merupakan upaya sistematis dan terpadu untuk menjaga fungsi lingkungan hidup serta mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Ini mencakup berbagai langkah seperti perencanaan, penggunaan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Tujuan utamanya adalah untuk melestarikan keberlanjutan ekosistem dan menjaga kualitas lingkungan agar tetap mendukung kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Melalui UUPPLH, diharapkan dapat tercipta harmoni antara pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu tindakan sistematis dan terpadu untuk menjaga kelestarian fungsi-fungsi lingkungan hidup. Ini mencakup berbagai kegiatan seperti perencanaan yang mempertimbangkan dampak lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, pengendalian polusi, pemeliharaan keanekaragaman hayati, pemulihan ekosistem yang terganggu, pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.

Pelestarian lingkungan menjadi semakin penting karena sumber daya alam yang tersedia memiliki batasan baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Keterlibatan dalam pengelolaan lingkungan dapat dilakukan secara sukarela oleh individu atau kelompok masyarakat yang memiliki kesadaran terhadap pentingnya menjaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Hal ini juga

ditekankan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menetapkan pedoman dan aturan agar setiap kegiatan manusia tidak hanya mempertimbangkan kepentingan ekonomi dan sosial, tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan secara keseluruhan.

Pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keberlanjutan, di mana kegiatan manusia diharapkan tidak merusak sumber daya alam dan lingkungan, melainkan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia serta keanekaragaman hayati yang ada. Dengan demikian, upaya pelestarian lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga terkait, tetapi juga merupakan komitmen bersama seluruh masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi generasi saat ini dan masa depan (Rusdina, 2015).

Gubernur Jawa Barat melalui Surat Edaran No. 522.4/17/Rek tanggal 17 Februari 2020 Tentang Pelaksanaan Gerakan Tanam dan Pelihara Pohon di Lahan Kritis Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Jawa Barat untuk melaksanakan gerakan tanam pohon dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis serta untuk mewujudkan Pemulihan Daerah Aliran Sungai di Jawa Barat, sebagai upaya perwujudan dari pengelolaan lingkungan hidup.

### **2.1.3.2 Gerakan Tanam dan Pelihara Pohon (GTPP)**

Gerakan penanaman pohon adalah salah satu upaya konkret untuk melindungi Bumi dari dampak pemanasan global yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Tindakan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan lingkungan agar nyaman dan ramah bagi semua makhluk hidup, seperti yang dijalankan oleh nenek moyang pada masa lampau (Mina, 2016). Perkembangan zaman saat ini menunjukkan bahwa banyak produk tidak ramah lingkungan yang dapat merusak alam, karena mengandung bahan-bahan beracun dan berpotensi mencemari lingkungan. Contoh dari masalah ini antara lain adalah tingginya jumlah kendaraan bermotor dan penggunaan kantong plastik yang berlebihan. Penanaman pohon bukan hanya sekadar upaya rekreatif, tetapi juga strategi penting dalam

memperbaiki dan memulihkan ekosistem yang terganggu. Melalui peningkatan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan dan pengurangan jejak karbon, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam mengatasi tantangan lingkungan global saat ini. Dengan demikian, partisipasi dalam gerakan penanaman pohon menjadi langkah awal yang signifikan menuju keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan bersama di masa depan.

Gerakan penanaman dan pemeliharaan pohon bukan hanya merupakan langkah moral untuk meningkatkan kesadaran lingkungan, tetapi juga sebuah strategi taktis dalam mencegah dampak-dampak yang dapat merusak Bumi. Dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, gerakan ini bertujuan untuk mengantisipasi perubahan iklim yang sedang terjadi dan yang akan datang. Upaya ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas udara dan lingkungan secara keseluruhan, tetapi juga pada upaya mempertahankan keseimbangan ekosistem global. Penanaman pohon merupakan salah satu langkah konkret dalam memperbaiki kondisi lingkungan yang semakin terancam oleh urbanisasi dan industrialisasi. Melalui aksi kolektif ini, masyarakat diharapkan dapat merespons tantangan lingkungan dengan cara yang lebih proaktif dan berkelanjutan. Dengan demikian, gerakan ini bukan sekadar upaya individu atau kelompok dalam melestarikan lingkungan, tetapi juga bagian dari strategi global untuk memastikan bahwa Bumi tetap hijau dan segar bagi generasi mendatang (Asmarahman & Indriyanto, 2023).

Manusia saat ini tidak lagi terbatas oleh batasan geografis dan negara dalam menyadari pentingnya konsep pembangunan berkelanjutan. Fenomena revolusi lingkungan seperti bola salju menunjukkan bahwa orang-orang di seluruh dunia semakin sadar akan kebutuhan akan kelestarian alam. Meskipun secara umum semua orang sepakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan, tantangan utama yang muncul adalah bagaimana cara menerapkan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya, kesadaran akan pentingnya penyelamatan lingkungan seringkali berdampak pada pengorbanan beberapa kesenangan pribadi. Contohnya termasuk pengurangan penggunaan kendaraan pribadi, membatasi konsumsi listrik, mengurangi penggunaan pendingin ruangan,

atau bahkan menghindari penggunaan bahan kimia yang berpotensi merusak lingkungan. Tindakan-tindakan ini mungkin terasa ekstrim bagi sebagian orang, namun merupakan langkah yang diperlukan untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan global (Wattimena et al., 2019).

Program gerakan tanam pohon adalah inisiatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup dengan menanam pohon sebanyak mungkin. Melalui penanaman pohon, manusia dapat memperoleh oksigen yang vital untuk pernapasan dan air minum yang sehat. Pemerintah mendukung gerakan ini dengan tujuan membangun masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berwawasan lingkungan berkelanjutan, serta menjaga keseimbangan ekologi alam (Reski, 2022).

Badan pengolahan pengembangan lahan kritis bertujuan menanam sejuta pohon setiap tahunnya di lahan-lahan kritis. Penanaman dilakukan dengan pendekatan ekologis yang melibatkan masyarakat secara sosial dan bertanggung jawab. Fokus utama dari program ini bukan hanya untuk menciptakan penghasilan, tetapi lebih kepada menjaga keseimbangan iklim global. Menyadari bahwa mengabaikan kepentingan ekologis demi keuntungan jangka pendek dapat berdampak buruk pada sistem iklim global. (Putra, 2023). Penanaman pohon dapat mengembalikan sumber daya kepada penduduk dan mengembalikan kendali atas hak milik umum kepada mereka. Upaya untuk merebut kembali hak milik umum dibantu dengan menyelesaikan beberapa kekacauan (Purlilaiceu et al., 2023).

- a. Kekacauan terjadi dalam pemahaman antara lahan kritis yang merupakan milik umum dan lahan kritis yang mengalami kerusakan ekologis, baik yang berstatus milik pribadi maupun milik umum.
- b. Penanaman pohon merupakan tindakan untuk mengembalikan hutan. Ini adalah bagian dari upaya untuk mengembalikan kehijauan pada lahan-lahan kritis.

Gerakan ini tidak sekadar merupakan upaya moral untuk meningkatkan kesadaran lingkungan, melainkan juga sebuah strategi taktis untuk mengantisipasi

perubahan iklim saat ini dan di masa depan. Secara singkat, gerakan ini mewakili sebuah era pembaruan dalam pemikiran dan tindakan konkret untuk mengintegrasikan kehidupan dengan lingkungan. Hutan, sebagai bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia, hadir dalam berbagai kondisi iklim dan geografis, dari daerah tropis hingga beriklim dingin, dari dataran rendah hingga pegunungan, dari pulau kecil hingga benua besar. Hutan adalah kumpulan tumbuhan, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lainnya, yang meliputi wilayah yang luas dan memainkan peran penting dalam ekosistem global (Wattimena et al., 2019).

Pohon merupakan jenis tumbuhan tinggi dengan siklus hidup yang berlangsung bertahun-tahun, berbeda dengan tanaman sayuran atau padi yang hidup hanya dalam satu musim tanam. Secara mencolok, pohon memiliki batang utama yang tegak dan berkayu, serta mahkota daun yang menonjol. Sebuah kumpulan pohon dapat dianggap sebagai hutan jika mampu menciptakan iklim dan kondisi lingkungan yang khas di tempat tersebut, yang berbeda dengan lingkungan di sekitarnya. Contohnya, berada di hutan hujan tropis terasa seperti memasuki ruang sauna yang hangat dan lembab, berbeda dengan daerah pertanian di sekitarnya yang terbuka. Selain itu, pemandangan di dalam hutan juga berbeda, mencakup berbagai tumbuhan, hewan, dan unsur-unsur non-hidup yang menyusun ekosistem hutan secara utuh (Asmarahman & Indriyanto, 2023; Ulfa & Solehah, 2023).

Gerakan tanam danelihara pohon memiliki berbagai fungsi yang penting. Salah satunya adalah fungsi pemeliharaan lingkungan, di mana kesuksesan dari program ini diharapkan dapat menjadikan lingkungan lebih asri dan sehat. Pohon-pohon yang ditanam mampu memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga kualitas udara, mempertahankan kestabilan tanah, serta menyediakan habitat bagi berbagai makhluk hidup. Di samping itu, gerakan ini juga memiliki fungsi edukasi yang sangat penting. Melalui kegiatan menanam pohon, anak-anak dan generasi penerus lainnya dapat diberi pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Mereka belajar secara langsung bagaimana lingkungan alam berperan dalam kehidupan mereka sehari-hari dan mengembangkan sikap

peduli terhadap lingkungan sejak dini.

Tindakan ini sejalan dengan upaya pemerintah, yang menetapkan tanggal 28 November sebagai Hari Menanam Pohon Indonesia dan bulan setelahnya sebagai Bulan Menanam Nasional. Dengan demikian, gerakan tanam danelihara pohon tidak hanya berfungsi untuk memperbaiki lingkungan fisik, tetapi juga sebagai sarana penting dalam mendidik dan meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat.

Penanaman pohon dalam skala besar memiliki dampak positif yang signifikan, terutama dalam mendukung tumbuhnya hutan lestari yang memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah sebagai daya tarik wisata alam yang memikat, menarik wisatawan untuk menikmati keindahan alam dan keanekaragaman hayati yang ditawarkan oleh hutan tersebut. Selain sebagai daya tarik wisata, penanaman pohon juga memiliki fungsi konservasi yang penting. Ini mencakup konservasi udara, di mana pohon-pohon berperan dalam menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, memperbaiki kualitas udara, serta membantu mengurangi efek pemanasan global. Selain itu, konservasi air menjadi fungsi penting lainnya, karena pohon-pohon membantu mempertahankan siklus air dan mencegah erosi tanah. Selain itu, pohon-pohon juga berperan dalam konservasi lahan, dengan akar mereka yang dapat mengikat tanah, mencegah erosi, dan mempertahankan kesuburan tanah (Putra, 2023; Reski, 2022).

Penanaman pohon memiliki dampak konservasi yang signifikan dalam beberapa aspek lingkungan. Secara khusus:

- a) **Konservasi Udara:** Pohon berperan dalam menyerap karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) dari udara melalui proses fotosintesis dan menghasilkan oksigen sebagai produk sampingannya. Proses ini membantu mengurangi jumlah CO<sub>2</sub> dalam atmosfer, yang berkontribusi pada mitigasi efek pemanasan global dan perubahan iklim.
- b) **Konservasi Air:** Penanaman pohon tertentu, terutama di sekitar sumber mata air dan sungai, dapat meningkatkan ketersediaan debit air. Akar pohon membantu menahan air hujan di tanah, memperlambat aliran air permukaan, dan meresapkan air ke dalam tanah. Hal ini membantu dalam menjaga

kestabilan debit air di sungai dan mata air, serta mencegah erosi tanah.

- c) Konservasi Lahan: Pohon-pohon memiliki peran penting dalam mencegah erosi tanah. Akar pohon membantu mengikat tanah, menjaga kestabilan lereng gunung, dan mengurangi risiko tanah longsor serta banjir yang disebabkan oleh aliran air permukaan yang tidak terkendali. Dengan demikian, penanaman pohon dapat berkontribusi dalam mengeliminir bencana alam yang terkait dengan erosi tanah.

Dari perspektif sosial dan kepedulian lingkungan, gerakan penanaman pohon diinisiasi oleh pemerintah sebagai wujud kebaikan dan cinta terhadap bumi serta lingkungan hidup. Gerakan ini bukan hanya sekadar simbolis, tetapi merupakan komitmen nyata untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan memperbaiki kondisi alam di sekitar kita. Keberlanjutan gerakan penanaman pohon menjadi penting untuk menjamin bahwa manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan dari masa ke masa.

Pemeliharaan pohon merupakan langkah yang krusial untuk memastikan bahwa pohon dapat tumbuh dan berproduksi dengan optimal sepanjang masa hidupnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menggarisbawahi pentingnya pemeliharaan secara berkelanjutan agar pohon dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara maksimal serta memiliki daur hidup yang panjang (Indriyanto, 2010). Secara umum, kegiatan pemeliharaan pohon meliputi berbagai aspek, seperti penyulaman untuk menggantikan pohon yang mati atau tidak tumbuh dengan baik, serta penyiangan untuk mengendalikan pertumbuhan gulma yang dapat mengganggu pertumbuhan pohon. Selain itu, pengendalian hama dan penyakit juga menjadi bagian penting dalam pemeliharaan pohon untuk menjaga kesehatan mereka dari serangan yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya. Upaya pencegahan terhadap kebakaran juga menjadi bagian dari pemeliharaan pohon, terutama di daerah yang rentan terhadap kebakaran hutan. Selain itu, pemupukan secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan pohon juga perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa pohon mendapatkan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan dan produksi yang optimal. Dengan demikian, pemeliharaan pohon bukan hanya sekadar kegiatan rutin, melainkan investasi jangka panjang

dalam menjaga keberlangsungan hidup dan manfaat ekologis dari pohon-pohon tersebut (Asmarahman & Indriyanto, 2023; Ulfa & Solehah, 2023).

Penyulaman pohon menjadi penting ketika lebih dari 20% bibit yang ditanam mati, untuk memastikan jumlah pohon yang hidup mencapai target penanaman yang direncanakan. Hal ini merupakan strategi untuk memaksimalkan keberhasilan program penanaman dengan menggantikan bibit yang tidak bertahan hidup dengan yang baru. Selain itu, penyiangan gulma juga menjadi langkah kritis dalam pemeliharaan pohon aren, karena gulma dapat bersaing dengan pohon aren untuk mendapatkan nutrisi, air, cahaya, ruang tumbuh, dan CO<sub>2</sub>. Gulma juga dapat mengeluarkan senyawa allelopati yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan pohon aren (Djainal, 2015). Penyiangan dilakukan secara teratur, idealnya 2-3 kali dalam setahun atau setiap 4-6 bulan sekali, dengan metode membersihkan gulma secara mekanik di sekitar pohon (Asmarahman & Indriyanto, 2023).

Pemupukan adalah proses memberikan bahan organik atau anorganik, baik alami maupun buatan, yang mengandung nutrisi esensial ke dalam tanah sesuai dengan kebutuhan pohon (Djainal, 2015). Tindakan ini diperlukan jika tanah di mana pohon tumbuh kekurangan unsur hara yang diperlukan, yang dapat memperlambat laju pertumbuhan pohon. Menurut Indriyanto (2010), pemupukan sebaiknya dilakukan pada awal pertumbuhan hingga pohon mencapai usia dua tahun, dengan waktu yang tepat adalah pada awal musim hujan. Pemilihan waktu ini penting untuk memastikan nutrisi tersedia cukup saat pohon sedang aktif tumbuh, sehingga dapat mendukung perkembangan optimalnya. Dengan demikian, pemupukan menjadi bagian integral dari strategi pemeliharaan pohon untuk memastikan kondisi tanah mendukung pertumbuhan yang sehat dan produktif bagi pohon-pohon yang ditanam.

Melakukan pencegahan terhadap hama dan penyakit pada pohon lebih disarankan daripada harus melakukan pemberantasan setelah terjadi serangan. Pencegahan dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti memilih jenis pohon yang memiliki resistensi terhadap hama dan penyakit tertentu. Pengaturan jarak tanam yang mempertimbangkan kelembapan udara juga penting, karena

kelembapan yang tinggi dapat memperburuk kondisi yang mendukung pertumbuhan hama dan penyakit. Selain itu, perbaikan sanitasi lingkungan dengan menghilangkan tumpukan sisa tanaman yang berpotensi menjadi sarang hama dan penyakit, dikenal sebagai metode silvikultur, juga merupakan langkah pencegahan yang efektif (Ulfa, 2023; Indriyanto, 2010).

Apabila serangan hama dan penyakit telah terjadi, pemberantasan dapat dilakukan dengan berbagai metode. Secara kimia, penggunaan pestisida dapat menjadi solusi untuk mengendalikan populasi hama yang mengganggu. Pendekatan biologis, seperti pelepasan musuh alami dari hama, juga dapat digunakan sebagai alternatif yang ramah lingkungan. Selain itu, metode pemberantasan secara fisik-mekanis dengan melakukan penangkapan hama secara langsung dapat menjadi pilihan lain yang efektif dalam mengurangi populasi hama dan penyakit pada pohon (Ulfa, 2023; Indriyanto, 2010). Dengan melakukan kombinasi strategi pencegahan dan pemberantasan yang tepat, dapat diharapkan kondisi kesehatan pohon terjaga dengan baik sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal (Ulfa, 2023; Indriyanto, 2010).

Pada dasarnya, pengendalian hama dan penyakit pada pohon, baik melalui pencegahan maupun pemberantasan, perlu dilakukan secara dini untuk mencegah penyebaran dan mengurangi potensi kerugian yang lebih besar. Setiap petani hutan umumnya melakukan pemeliharaan terhadap pohon-pohon yang ditanam oleh masyarakat, namun jenis-jenis pemeliharaan yang dilakukan dapat bervariasi (Rusdina, 2015). Beberapa petani hutan menerapkan semua jenis pemeliharaan secara penuh, sementara yang lain mungkin hanya melakukan sebagian tertentu dari pemeliharaan tersebut. Namun, jumlah petani hutan yang melaksanakan semua jenis pemeliharaan masih terbilang sedikit.

Selain itu, intensitas pemeliharaan pohon yang dilakukan oleh petani hutan umumnya masih rendah. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan komitmen dari semua pihak terkait untuk menjaga dan memelihara kelestarian hutan dengan lebih baik, demi mendukung ekosistem yang sehat dan produktif dalam jangka panjang (Antasari al.,2020).

### **2.1.3.3 Program Gerak Tanam dan Pelihara Pohon (GTPP)**

Program-program yang dijalankan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat termasuk Gerakan Tanam Pelihara Pohon (GTPP) Berjuta Pohon, yang bertujuan untuk meningkatkan penghijauan dan pemeliharaan hutan. Selain itu, ada juga program SimantriBibit untuk informasi penanaman, SIMANTAP untuk informasi pemeliharaan, dan Singmanfaat untuk informasi hasil hutan. Program-program ini dirancang untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya alam.

Partisipasi dalam kegiatan tanam dan pemeliharaan pohon di wilayah ini sangat penting. Sejak tahun 2008, berbagai kegiatan telah dilaksanakan secara rutin setiap bulannya, yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi lingkungan lokal dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pengetahuan baru mengenai manfaat tanaman dan teknik perawatan yang diperoleh dari pelatihan membuat masyarakat lebih percaya diri dalam merawat pohon dan mampu memilih jenis pohon yang cocok untuk lingkungan mereka, seperti jati, ganitri, arba, dan jati putih.

Selain aspek teknis, program ini juga mendorong kemandirian dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan tanam serta pemeliharaan pohon di lahan pribadi. Manfaat ekonomi dan sosial yang telah dirasakan mencakup peningkatan keterampilan komunitas dalam merawat lingkungan hidup dan berbagi pengetahuan antar anggota komunitas. Namun, masih ada aspek yang perlu diperbaiki, terutama dalam sistem pasar dan penjualan hasil tanaman, yang kadang-kadang terhambat oleh kurangnya permintaan pasar.

Pengembangan ide-ide baru dalam pelaksanaan kegiatan tanam dan pemeliharaan pohon terus didorong, dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan saran juga difasilitasi, meskipun ada beberapa usulan, seperti program "1 rumah 1 pohon," yang belum ditindaklanjuti. Upaya untuk memperbaiki dan menyesuaikan program agar lebih efektif dalam mencapai tujuan lingkungan hidup terus dilakukan, dengan fokus pada peningkatan sistem pasar dan penjualan hasil tanaman.

Gerakan Tanam Pelihara Pohon (GTPP) merupakan salah satu program utama yang dijalankan oleh Dinas Kehutanan Wilayah VI Jawa Barat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah pohon di wilayah tersebut sebagai upaya konkret dalam melestarikan lingkungan hidup dan mengurangi dampak perubahan iklim. GTPP bertujuan untuk menanam dan merawat pohon-pohon di berbagai lokasi strategis seperti lahan kritis, kawasan lindung, dan area terdegradasi. Dengan menambah jumlah pohon, program ini berharap dapat meningkatkan tutupan hutan, memperbaiki kualitas udara, serta mempertahankan fungsi ekosistem yang penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan fauna lokal.

Program GTPP melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat, lembaga pemerintah, dan organisasi non-pemerintah dalam kegiatan penanaman dan pemeliharaan pohon. Kegiatan ini sering kali dilakukan secara massal dalam bentuk kampanye tanam pohon, baik di lahan milik pemerintah maupun swasta, serta di sepanjang tepi jalan dan sungai. Selain manfaat ekologis seperti mengurangi erosi tanah dan menjaga keanekaragaman hayati, GTPP juga memberikan dampak sosial yang signifikan.

#### **2.1.3.4 Urgensi Penanaman dan Pemeliharaan Pohon**

Penanaman dan pemeliharaan pohon memiliki urgensi yang sangat besar bagi lingkungan hidup dan kesejahteraan umum (Amin et al., 2019). Berikut beberapa alasan mengapa hal ini sangat penting:

- a. **Produksi Oksigen:** Pohon adalah produsen utama oksigen melalui proses fotosintesis. Masyarakat menyerap karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) dan menghasilkan oksigen yang diperlukan oleh manusia dan hewan. Penanaman pohon membantu menjaga keseimbangan oksigen dan karbon di atmosfer.
- b. **Pengendalian Iklim:** Pohon berperan dalam mengendalikan suhu dan iklim lokal. Daerah yang ditutupi oleh pepohonan cenderung memiliki suhu yang lebih rendah, karena pohon menyediakan naungan dan mengurangi efek pemanasan oleh sinar matahari.
- c. **Konservasi Air:** Sistem perakaran pohon membantu dalam mempertahankan tanah dan mengurangi risiko erosi. Pepohonan juga

berkontribusi pada siklus air dengan menyerap air hujan, mengurangi risiko banjir, dan menyimpan air dalam tanah.

- d. Keanekaragaman Hayati: Hutan dan area vegetasi lainnya menyediakan habitat untuk berbagai spesies tumbuhan dan hewan. Keanekaragaman hayati ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung rantai makanan.
- e. Pengendalian Pencemaran: Pohon dapat menyerap sejumlah polutan dan gas berbahaya dari udara, seperti sulfur dioksida, ammonia, dan ozon. Hal ini membantu meningkatkan kualitas udara di sekitarnya.
- f. Pengurangan Gas Rumah Kaca: Pohon menyimpan karbon dalam bentuk biomassa mereka. Penanaman pohon dan praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan dapat berperan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca di atmosfer, yang berdampak pada perubahan iklim.
- g. Penghijauan Perkotaan: Penanaman pohon di kota-kota membantu menciptakan kawasan hijau, meredam panas, dan memberikan lingkungan yang lebih sejuk dan nyaman bagi penduduk kota. Ini juga dapat mengurangi polusi udara dan kebisingan.
- h. Penghasilan Ekonomi dan Sosial: Pohon dapat memberikan hasil ekonomi melalui kayu, buah-buahan, dan produk hutan lainnya. Selain itu, keberadaan pepohonan mendukung kehidupan masyarakat lokal dan tradisi budaya.

Melalui penanaman dan pemeliharaan pohon, sebagai upaya dalam menjaga keseimbangan ekosistem, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pelestarian pepohonan dan penanaman pohon sangat penting untuk melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup bagi generasi mendatang (Putra, 2023; Reski, 2022; Wattimena et al., 2019).

## **2.2 Hasil Penelitian yang Relevan**

Penelitian yang relevan merupakan acuan bagi peneliti dalam membuat penelitian. Berikut adalah beberapa hasil penelitian yang relevan:

**A. Rizal Ahmad (2016), “Difusi Inovasi dalam Meningkatkan Partisipasi**

### **Masyarakat akan Kelestarian Lingkungan”**

Menurunnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan saat ini mendorong perlunya upaya nyata untuk mengembalikan keadaan lingkungan menjadi lebih baik seperti sebelumnya. Melalui inovasi dan ide-ide kreatif yang diinisiasi oleh komunitas Kuya Tilubelas, upaya untuk membangkitkan peran masyarakat sebagai subjek pembangunan sedang ditekankan kembali.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunitas di RW 13 Tamansari sedang mengembangkan model konseptual yang dikenal sebagai gerakan Cikapundung bersih. Gerakan ini berbasis keberlanjutan lingkungan, meliputi beberapa inisiatif seperti penanaman bibit ikan keket untuk mengembalikan populasi makhluk hidup di sungai, penanaman bibit pohon untuk memperluas ruang terbuka hijau di sepanjang sungai, pemeliharaan kirmir sungai untuk mengelola aliran air dan melindungi lingkungan warga, penggunaan *River Board* untuk memanfaatkan potensi alam sebagai area rekreasi, serta implementasi Septitank Komunal sebagai langkah untuk mengurangi pencemaran dari limbah cair. Konsep ini bertujuan untuk membangkitkan kesadaran lingkungan dan melibatkan aktifitas partisipatif dari masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan sekitar mereka.

### **B. Ibrahim (2022), “Gerakan Penanaman Pohon Bersama Karang Taruna Desa Rempe Kecamatan Seteluk Sumbawa Barat”**

Penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan penanaman pohon yang melibatkan Karang Taruna dimulai dari perjalanan sejauh 133 KM dari kampus Universitas Muhammadiyah Mataram menuju Desa Rempe, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat. Kegiatan ini dilaksanakan bersama Karang Taruna Desa Rempe serta tim dosen Universitas Muhammadiyah Mataram pada tanggal 22 Mei 2022. Awalnya, bibit pohon diambil dari Balai KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Kabupaten Sumbawa Barat. Penanaman pohon ini memiliki nilai penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Upaya ini bertujuan untuk menjaga alam yang semakin tandus akibat eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Selama musim hujan, masyarakat mengalami masalah air yang turun dari

gunung dalam jumlah besar, yang dapat menyebabkan tanah longsor. Permasalahan ini menjadi peringatan bahwa kondisi alam memerlukan perhatian serius untuk pemulihannya

Lewat pengabdian kepada masyarakat, pelestarian dan penanaman pohon sangat penting dilakukan. Bantuan dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) mencakup penyediaan pohon-pohon penghijauan, seperti 100 pohon Jati, 100 pohon Trembesi, dan berbagai jenis pohon Akasia. Selain itu, BLH juga menyediakan tanaman hias seperti mawar, pucuk merah, dan lainnya. Upaya ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi lingkungan serta meningkatkan keindahan dan kesehatan lingkungan sekitar. Data akan dianalisis secara etnografis, dimulai dari pencatatan lapangan, diikuti dengan pengkodean, klasifikasi, dan pengorganisasian sistematis untuk mengidentifikasi dan mengembangkan tema-tema utama. Analisis juga akan didukung oleh teori-teori relevan dan temuan penelitian sebelumnya sebagai alat analisis yang diperlukan.

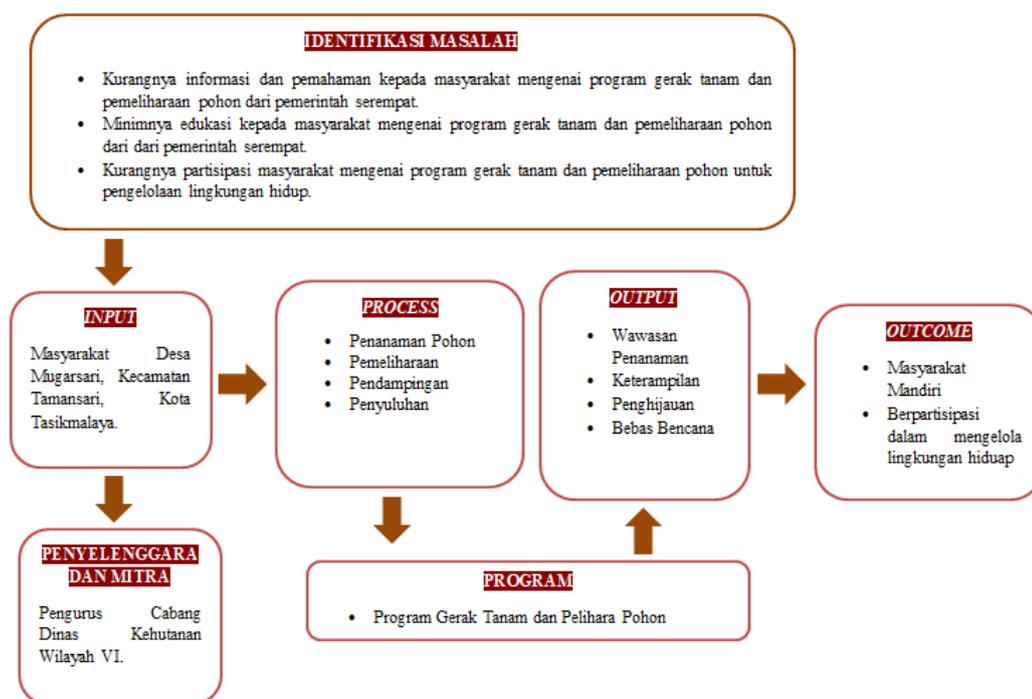
### **2.3 Kerangka Konseptual**

Berbagai fungsi dapat dilaksanakan melalui gerakan tanam danelihara pohon. Dalam rangka menindaklanjuti Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pengendalian dan Rehabilitas Lahan Kritis serta untuk mewujudkan Pemulihan Daerah Aliran Sungai di Jawa Barat, dengan adanya program ini adalah salah satu upaya membantu masyarakat Jawa Barat untuk melaksanakan gerakan tanam pohon. Berdasarkan Surat Edaran Pembangunan dan Sumber Daya Alam Se- Jawa Barat ini , fungsi tersebut meliputi lima hal yaitu fungsi pemulihan daerah, sosial budaya, edukasi, dan fungsi kelestarian alam.

Partisipasi Masyarakat dalam Program Gerakan Penanaman Pohon dalam Pemeliharaan Lingkungan oleh Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI merupakan program yang diselenggarakan oleh pemerintah Jawa Barat (Gubernur) Bandung, 19 Februari 2020 yang terselenggara karena adanya program gerakan tanam danelihara pohon di lahan kritis Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat, dimana hasil dari penelitian ini diharapkan lulusan peserta pelatihan dapat mandiri, serta meningkatkan keterampilan bercocok tanam dan dapat menjaga kelestarian alam

dari mencegah terjadinya kerusakan lingkungan serta meningkatkan kualitas hidup yang baik.

Dengan demikian tujuan dilakukannya program gerakan tanam danelihara pohon dalam rangka pengelolaan lingkungan untuk memperoleh pengetahuan, pengalaman serta menjadikan alam lebih asri dan nyaman. Hasil program yang dilakukan diharapkan memberikan dampak positif untuk kehidupan bagi masyarakat setelah menyelesaikan gerakan tanam danelihara pohon, menjadi perubahan baik bagi lingkungan. Kerangka konseptual dalam penelitian ini tertuang pada Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.



**Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual**

#### 2.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan paparan di atas, adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana menggerakkan partisipasi masyarakat pada Program Gerak Tanam dan Pelihara Pohon dalam pengelolaan lingkungan hidup di Desa Mugarsari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI?